KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tidak semua fraksi DPR wajibkan laporan reses
Tanggal : Rabu, 07 Januari 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Sepekan Lagi Pembukaan Masa Sidang Kedua

Tidak Semua Fraksi DPR Wajibkan Laporan Reses

Tidak semua fraksi partai politik di DPR mewajibkan para anggotanya menyerahkan laporan dana dan kegiatan reses. Di antaranya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Padahal menurut Wakil Ketua DPR yang juga Sekretaris Jenderal PAN, Taufik Kurniawan, laporan pertanggungjawaban reses diwajibkan Tata tertib DPR.

KEGIATAN reses para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan berakhir pada 11 Januari 2014. Pimpinan DPR mengingatkan para pimpinan komisi dan pimpinan fraksi untuk mewajibkan para anggotanya menyusun laporan kegiatan kunjungan kerja ke daerah pemilihan selama masa reses.

"Jangan lupa untuk mengingatkan para anggota membuat laporan," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, saat dikontak *Rakyat Merdeka*, dari Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, semua anggota DPR wajib menyetorkan laporan kegiatan reses, karena diatur Tata Tertib DPR. Ada sanksi bagi anggota DPR yang tidak membuat laporan. "Jika ada anggota DPR yang belum lengkap laporan resesnya, maka anggota itu tidak akan diberikan dana reses untuk masa reses selanjutnya," terang politikus Partai Amanat Nasional itu. Kelengkapan laporan kegiatan reses meliputi bentuk kegiatan, berapa jumlah warga yang hadir, dan lain-lain.

Meskipun total masa reses satu bulan, terang Taufik, para anggota DPR hanya diwajibkan menemui masyarakat di daerah pemilihan hanya sembilan hari. Jadi pada masa reses kali ini dimulai pada tanggal 11 Desember 2014 hingga 11 Januari 2015, bukan berarti selama sebulan para anggota DPR wajib berada di daerah.

"Yang wajib hanya sembilan hari mengunjungi daerah pemilihan. Karena negara hanya memberikan biaya kunjungan kerja selama sembilan hari saja. Jadi, besarannya dihitung dari ongkos perjalanan dari Jakarta menuju daerah pemilihan, biaya akomodasi selama sembilan hari, serta biaya pertemuan-pertemuan dengan warga. Lebih dari sembilan hari, negara tidak membayar," terangnya.

Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan itu mengamini, masih ada stigma negatif soal masa reses DPR, yang selama ini dipandang miring oleh sebagian pihak. Seperti penyimpangan anggota DPR saat menemui konstituen, baik itu berupa penyimpangan waktu maupun dana reses.

"Laporan keuangan reses lengkap di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR. Kalau laporannya tidak benar, mana mungkin Badan Pemeriksa Keuangan memberikan DPR predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," tegasnya.

Menanggapi imbauan Taufik Kurniawan, Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Dossy Iskandar Prasetyo mengatakan, fraksinya telah memiliki standar pelaporan reses. "Sebelum reses, kami sudah briefing semua anggota fraksi," kata Dossy saat dikontak *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Dossy mengatakan, dia juga sudah menghubungi para anggota DPR Fraksi Hanura untuk segera menyusun laporan penggunaan dana reses, untuk diserahkan kepada pimpinan fraksi. "Nanti pasti mereka setor," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura itu.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini juga mengatakan, fraksinya memiliki standar pelaporan reses. Format laporan dibuat untuk menguatkan secara teknis bahwa para anggota DPR Fraksi PKS benar-benar turun menemui masyarakat pada masa reses. "Ada beberapa formulir yang harus diisi para anggota Fraksi PKS. Di antaranya, tanda tangan panitia acara, kwitansi bukti bayar, dan dokumen berupa foto, video dan lain-lain," jelasnya.

Menurut Jazuli, bagi para anggota DPR Fraksi PKS, menemui masyarakat di daerah pemilihan bukan beban, melainkan kebutuhan yang selalu menyatu dengan masyarakat. Bahkan, di luar masa reses pun anggota Fraksi PKS banyak yang pulang ke daerah pemilihan dan melakukan berbagai kegiatan bersama masyarakat.

"Bahkan, kader PKS yang bukan legislator pun selalu melayani mayarakat dengan menggelar bakti sosial dan para relawan kala bencana. Apalagi yang telah menjadi anggota dewan," demikian Jazuli. ■ FAZ